

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 Teori Agensi dalam Pemerintahan

Teori keagenan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak (*agent*) setuju untuk bertindak dengan persetujuan pihak yang lain (*principal*). Zimmerman dalam Syafitri (2012:10), mengatakan bahwa *agency problem* muncul ketika prinsipal mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Menurut Meiser dalam Syafitri (2012:10), hubungan keagenan ini menyebabkan dua permasalahan, yaitu adanya informasi asimetris dimana agen secara umum memiliki lebih banyak informasi dari prinsipal dan terjadi konflik kepentingan akibat ketidaksamaan tujuan, dimana agen tidak selalu bertindak sesuai dengan tujuan kepentingan prinsipal. Dengan demikian, *agency problem* muncul karena agen muncul karena agen mempunyai informasi yang lebih baik, berkesempatan untuk mengambil keputusan atau bertindak sesuai dengan kepentingannya tanpa menghiraukan kepentingan *principal*.

Zimmerman dalam Syafitri (2012:10) menyatakan bahwa *agency problem* terjadi pada semua organisasi. Pada perusahaan *agency problem* terjadi antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Pada sektor pemerintahan *agency problem* terjadi antara pejabat yang terpilih rakyat sebagai *agent* dan para pemilih (masyarakat) sebagai *principal*. Pejabat pada pemerintahan sebagai pihak yang menyelenggarakan pelayanan publik, memiliki lebih banyak informasi sehingga dapat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat sebagai *principal* seperti menggunakan kepentingan pribadi, termasuk korupsi (Darmastuti, 2011).

Menurut Lane dalam Halim et. all (2006) juga menyatakan bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik Masalah keagenan yang terjadi pada pemerintahan, yaitu antara eksekutif dan legislatif dan antara legislatif dengan publik. Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif sebagai *agent* dan legislatif sebagai *principal*. Dalam hal ini, legislator

ingin dipilih kembali, dan agar terpilih kembali, legislator mencari program dan *project* yang membuatnya populer di mata konstituen.

Dalam hubungan keagenan antara legislatif sebagai agen publik sebagai principal, Von Hagen dalam Halim et. all (2006) berpendapat bahwa hubungan prinsipal-agen yang terjadi antara pemilih (*voters*) dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana *voters* memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Ketika pejabat kemudian terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka diharapkan dapat mewakili kepentingan atau preferensi prinsipal atau pemilihnya. Pada Kenyataannya pejabat sebagai agen selalu memiliki kepentingan yang sama dengan publik.

2.2 Sistem Informasi Akuntansi

2.2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi

Informasi akuntansi dalam instansi pemerintah adalah ibarat darah yang mengalir seluruh tubuh perusahaan tersebut. Informasi akuntansi merupakan bagian yang terpenting dari seluruh informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi akuntansi yang tepat, akurat dan cepat akan membuat instansi pemerintah menjadi sehat dan berkembang pesat. Oleh karena itu sistem informasi menjadi suatu masalah yang penting bagi setiap instansi. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai sistem informasi akuntansi, kita perlu tahu pengertian sistem dan informasi itu sendiri.

2.2.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Hall (2011:5) mendefinisikan bahwa sistem adalah gabungan dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan yang sama. Sementara informasi merupakan salah satu sumber daya penting bagi instansi untuk mengolah data dengan akurat dan terpercaya. Hall (2011:7) menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu subsistem yang memproses transaksi keuangan dan non-keuangan yang berpengaruh secara langsung terhadap

pemrosesan transaksi keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi yang menyimpulkan, memproses, dan menyediakan informasi-informasi yang berkaitan dengan transaksi akuntansi perusahaan.

2.2.3 Manfaat dan Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Hall (2011) mengemukakan ada tiga tujuan utama yang umum bagi semua sistem termasuk sistem informasi akuntansi, yaitu:

1. Untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen.
Kepengurusan merujuk ke tanggung jawab manajemen untuk mengatur sumber daya perusahaan secara benar. Sistem informasi menyediakan informasi tentang kegunaan sumber daya ke pemakai eksternal melalui laporan keuangan tradisional dan laporan-laporan yang diminta lainnya. Secara internal, pihak manajemen menerima informasi kepengurusan dari berbagai laporan pertanggungjawaban.
2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen.
Sistem informasi memberikan para manajer informasi yang mereka perlukan untuk melakukan tanggung jawab pengambilan keputusan.
3. Untuk mendukung kegiatan operasi organisasi hari demi hari
Sistem informasi menyediakan informasi bagi personel operasi membantu mereka melakukan tugas mereka setiap hari dengan efisien dan efektif.

Menurut Hall (2011:14) selain memiliki tujuan, setiap sistem informasi akuntansi akan melaksanakan fungsi utamanya, yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi organisasi.
2. Memproses data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen.
3. Memanajemen data-data yang ada ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh organisasi.
4. Mengendalikan pengendalian data yang cukup sehingga asset dari suatu organisasi atau organisasi terjaga.

5. Penghasil informasi yang menyediakan informasi yang cukup bagi pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, mengeksekusi perencanaan dan mengendalikan aktivitas.

Teknologi informasi mempunyai dampak paling dominan terhadap lingkungan Adapun manfaat dari sistem informasi akuntansi menurut Hall (2011:15) adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi, baik barang maupun jasa yang dihasilkan.
3. Meningkatkan keefektifitasan dan keefisiensian dalam bekerja dibandingkan mengolah data secara manual.
4. Meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan.
5. Meningkatkan sharing pengetahuan.
6. Untuk menerapkan sistem pengendalian internal, memperbaiki kinerja dan tingkat keandalan (*reliability*).
7. Untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggung jawaban (akuntabilitas).

2.2.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi

Baridwan (2013:7) menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi itu antara lain:

1. Perilaku manusia dalam organisasi
Perlu dipertimbangkan dalam menyusun sistem informasi akuntansi karena sistem informasi itu tidak mungkin berjalan tanpa manusia.
2. Penggunaan metode kuantitatif
Dengan metode kuantitatif informasi yang dihasilkan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh manajemen akan lebih terarah, sehingga keputusan yang akan dibuat lebih efektif.
3. Penggunaan komputer sebagai alat bantu.

Kemampuan komputer untuk mengolah data jauh melebihi kecepatan manusia, seperti:

- a. Verifikasi, yaitu komputer dapat mengecek kebenaran maupun kelayakan angka-angka yang menjadi input dalam suatu proses.
- b. Sortir, yaitu komputer memungkinkan untuk dilakukannya persortiran data ke dalam beberapa klasifikasi yang berbeda dengan cepat.
- c. Transmission, yaitu komputer dapat memindahkan data dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat.
- d. Perhitungan, yaitu dengan komputer perhitungan-perhitungan dapat dilakukan dengan cepat.

2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi merupakan mesin untuk menjalankan sistem informasi. Teknologi menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Dalam sistem informasi berbasis komputer, teknologi terdiri dari tiga komponen yaitu komputer, penyimpanan data diluar (*auxiliary storage*), telekomunikasi, dan perangkat lunak (*software*) (Mulyadi, 2010).

Definisi teknologi informasi menurut Darwanis & Mahyani (2009) dalam penelitiannya adalah teknologi yang mempunyai kemampuan sedemikian rupa untuk menangkap (*capture*), menyimpan (*store*), mengolah (*process*), mengambil kembali (*retrieve*), menampilkan (*represent*) dan menyebarkan (*transmit*) informasi. Pengembangan sistem informasi yang sesuai memerlukan perpaduan dari berbagai pengetahuan tentang sistem komputer, sistem informasi dan pengetahuan tentang bagaimana merancang dan menerapkan sebuah sistem informasi serta bagaimana memperoleh sistem komputer yang diperlukan.

Menurut Indriasari & Nahartyo (2008), teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia

dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Memanfaatkan kemajuan teknologi tidak hanya dalam teknologi komputer. Jaringan internet juga dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta pelayanan kepada masyarakat umum, salah satunya dengan kemudahan untuk mengakses profil pemerintah daerah melalui situs resmi pemerintah daerah terkait. Dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa situs adalah sebuah cara untuk menampilkan profil pemerintah daerah di internet dengan tujuan antara lain menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menerima masukan dari masyarakat. Selain akses profil pemerintah daerah yang terkait, dalam situs resmi tersebut masyarakat dapat mengakses mengenai informasi keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga telah diatur dalam PP No. 56 tahun 2005 bahwa, penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diinformasikan melalui situs resmi pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menerima masukan dari masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi berarti memanfaatkan teknologi dalam pengolahan data untuk mempermudah kerja pegawai. Menurut Hamzah (2009) pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Winidyaningrum & Rahmawati, 2010).

Pemanfaatan teknologi informasi termasuk didalamnya pengolah data, pengolahan informasi, serta proses kerja secara elektronik dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan kepada publik dengan adanya kemudahan dan kemurahan untuk mengakses informasi keuangan. Selain itu, pengolahan data dengan bantuan komputer jelas akan mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan. Sebagai contoh penerapan pemanfaatan teknologi didalam sektor

publik selain memberikan kemudahan dalam mengakses data keuangan antara lain, membantu proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Banyak kemudahan yang didapat jika menggunakan komputer, contoh sederhananya adalah hasil output pengolahan data lebih rapi jika dilakukan secara otomatis. Selain itu, proses pengolahan data dan transaksi ekonomi akan lebih cepat, dapat mempersingkat waktu. Sedangkan kelemahannya menurut Yosefrinaldi (2013), sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian *hardware* yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak.

2.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.4.1 Pengertian Kompetensi

Sumber daya manusia adalah aset organisasi yang paling berharga, begitulah pernyataan dari para pimpinan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam organisasi itu, perkiraan kas, aktiva tetap aktiva berwujud dan tidak berwujud nonmanusia lainnya itu sebenarnya dikendalikan oleh manusia. Manusialah yang mengelola suatu perusahaan, manusialah yang menciptakan nilai tambah, dan tanpa sumber daya manusia, perusahaan tidak akan bisa menghasilkan laba sebagai nilai tambah bagi organisasi itu sendiri.

Kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005 dalam Nurillah, 2014). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai

pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga (Nurillah, 2014).

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan kumpulan sumber daya manusia (SDM) beserta modal yang memiliki tugas dalam menyiapkan informasi keuangan dan informasi non keuangan (Antasari, 2015). Berdasarkan dengan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia berperan penting dalam terwujudnya keefektivitasan sistem informasi akuntansi.

Menurut Spencer dan Spencer yang dikutip oleh Sutrisno (2009:221) mengatakan bahwa: Kompetensi adalah suatu yang mendasari karakteristik dari suatu individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan. Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 pasal 3, menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki pegawai negeri sipil (PNS), berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Penilaian terhadap pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara objektif, berdasarkan kinerja para karyawan yang ada di dalam organisasi, dengan bukti penguasaan mereka terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap sebagai hasil belajar (Sutrisno, 2009:223).

Berdasarkan kutipan di atas, menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia organisasi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan yang dibebankan oleh organisasi. Kompetensi yang harus dikuasai oleh sumber daya manusia perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai, sebagai wujud hasil pelaksanaan tugas yang mengacu pada pengalaman langsung.

2.4.2 Komponen Pembentuk Kompetensi

Hutapea dan Thoha (2008:28) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*), informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu), misalnya bahasa komputer.
2. Kemampuan (*skill*), sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan. Misalnya standar perilaku para karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.
3. Perilaku individu (*attitude*), perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji.

Konsep dasar kompetensi berawal dari konsep individu yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan mengembangkan kemampuan individu agar dapat bekerja dengan prestasi yang luar biasa. Individu merupakan komponen utama yang menjadi pelaku dalam organisasi. Oleh karena itu, kemampuan organisasi tergantung dari kemampuan individu-individu yang bekerja dalam organisasi.

2.5 Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian

tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi (Arfianti, 2011).

2.5.1 Pengertian Pengendalian Intern

Menurut *Committee of Sponsoring Organization (COSO)* sebagaimana dikutip oleh Susanto (2008:95), pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh direksi organisasi, manajemen, dan personel lainnya, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai akan tercapainya tujuan dalam kategori berikut: (a) Efektivitas dan efisiensi operasi; (b) Keandalan pelaporan keuangan; (c) Ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian intern merupakan bagian integral dari proses manajemen karena konsep dasar dari pengendalian intern meliputi (1) berbagai kegiatan (*a process*), (2) dipengaruhi oleh manusia (*is affected by people*), dan (3) diharapkan dapat mencapai tujuan (*objectives*).

Pengendalian internal yang berkualitas adalah pengendalian yang efektif dan mengacu pada pencapaian dan sasaran organisasi atas pengendalian yang dirancang. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu pengendalian internal dikatakan efektif apabila memahami tingkat sejauh mana tujuan operasi entitas tercapai, laporan keuangan yang diterbitkan dipersiapkan secara handal, hukum dan regulasi yang berlaku dipatuhi. Suatu pengendalian intern bisa dikatakan efektif apabila ketiga kategori tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai, yaitu dengan kondisi: Direksi dan manajemen mendapat pemahaman akan arah pencapaian tujuan perusahaan, dengan, meliputi pencapaian tujuan atau target perusahaan, termasuk juga kinerja, tingkat profitabilitas, dan keamanan sumber daya (*asset*) perusahaan. Laporan Keuangan yang dipublikasikan adalah handal dan dapat dipercaya, yang meliputi laporan segmen maupun interim. Prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sudah taati dan dipatuhi dengan semestinya (Dewi et.al, 2012:161).

Selain manajemen perusahaan, pengendalian intern juga diperlukan oleh auditor independen yang ditugaskan untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan serta

kegiatan operasi perusahaan. Arti pentingnya sistem pengendalian intern bagi manajemen dan auditor sudah lama diakui oleh profesi akuntansi dan pengakuan tersebut semakin meluas dengan alasan (Boyntn, 2003:371):

1. Lingkup dan ukuran bisnis entitas telah menjadi sangat kompleks dan tersebar luas sehingga manajemen harus bergantung pada sejumlah laporan dan analisis untuk mengendalikan operasi secara efektif;
2. Pengujian dan penelaahan yang melekat dalam sistem pengendalian internal yang baik menyediakan perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dan ketidak beresan;
3. Tidak praktis bagi auditor untuk melakukan audit atas kebanyakan perusahaan dengan pembatasan biaya ekonomi tanpa menguntungkan pada sistem pengendalian internal.

Internal control merupakan serangkaian tindakan, kebijakan metode dan prosedur sebagai suatu proses yang melibatkan orang dalam melaksanakan keseluruhan operasi organisasi. *Internal control* ada dalam proses manajemen, baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan yang melibatkan dewan komisaris, manajemen dan personal lainnya untuk mencapai: 1) tujuan operasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif; 2) penyajian dan pengungkapan pelaporan keuangan yang dapat dipercaya; dan 3) mendorong kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Makhdalena, 2009:62).

Menurut Hartadi dalam Kristanto (2009:45), sistem pengendalian internal yang kuat, yaitu melalui kebijakan akuntansi yang sehat, penyelenggaraan sistem perkiraan yang cukup lengkap dan efektif, adanya perlindungan aktiva perusahaan dan berfungsinya staff pemeriksaan internal. Pengendalian intern yang dipahami sebagai usaha manajemen dalam menjaga aktiva (kekayaan) organisasi melalui penerapan prosedur tertentu bekerja melalui tiga dimensi dalam menjaga aktiva perusahaan. Pengendalian intern yang baik dan disertai praktek-praktek yang sehat dalam tata kelola keuangan akan menjaga kekayaan perusahaan secara *preventif, detektif* dan *korektif* (Wiratmaja, 2010:79).

Menurut Agoes (2004:79), pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting bagi proses pemeriksaan oleh akuntan publik, auditor harus mendokumentasikan pemahamannya tentang komponen pengendalian intern entitas yang diperoleh untuk merencanakan audit, karena baik buruknya pengendalian intern akan memberikan pengaruh yang besar terhadap:

1. Keamanan harta perusahaan
2. Dapat dipercayai atau tidaknya laporan keuangan perusahaan
3. Lama atau cepatnya proses pemeriksaan akuntansi
4. Tinggi rendahnya *audit fee*
5. Jenis opini yang akan diberikan akuntan public

2.5.2 Tujuan Pengendalian Internal

Pengendalian intern harus memberikan keyakinan bahwa seluruh transaksi telah mendapatkan otorisasi dan dilaksanakan dengan benar sesuai dengan kebijakan perusahaan, serta pencatatan transaksi tersebut dengan benar. Di bawah ini terdapat 5 tujuan pengendalian intern atas transaksi, yaitu (Suharli, 2006:55):

1. Otoritas (wewenang), Setiap transaksi harus mendapat otorisasi semestinya berdasarkan struktur dan kebijakan perusahaan. Dalam keadaan atau masalah-masalah tertentu sangat perlu ditentukan otorisasi khusus.
2. Pencatatan, Pencatatan atas transaksi harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan pada waktu yang tepat dengan uraian yang wajar. Transaksi yang dicatat adalah transaksi yang benar-benar terjadi dan lengkap.
3. Perlindungan, Harta fisik berwujud tidak boleh berada dibawah pengawasan atau penjagaan dari mereka yang bertanggungjawab. Dalam hal ini pengendalian intern memperkecil resiko terjadinya kecurangan oleh karyawan atau manajemen sekalipun.
4. Rekonsiliasi, secara *continue* dan periodik antara pencatatan dengan harta fisik harus dilakukan misalnya mencocokkan jumlah persediaan barang antara kartu persediaan dengan persediaan fisik di gudang.
5. Penilaian, Harus dibuat ketentuan agar memberikan kepastian bahwa seluruh harta perusahaan dicatat berdasarkan nilai yang wajar. Tidak boleh terjadi *over* ataupun *under valved* atas atas harta tersebut.

2.5.3 Komponen-Komponen Pengendalian Internal

Menurut Utomo (2006:72), komponen-komponen dari pengendalian Internal mencakup:

1. Lingkungan Lingkungan pengendalian (*Control Environment*), Komponen ini memperlihatkan bahwa hal yang terkandung pada kontrol terutama pada sistem akuntansi dan prosedur harus dijalankan.
2. Penetapan risiko, (*Risk Assesment*), komponen ini mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang dihadapi perusahaan dan bagaimana cara mengelola resiko tersebut.
3. Aktivitas pengendalian, memastikan bahwa setiap transaksi telah diotorisasi oleh yang berwenang, telah ada pemisahan fungsi, dokumentasi dan pencatatan yang memadai, harta dan catatan telah diamankan, dan pengecekan oleh pihak independent telah dilakukan serta penilaian terhadap pencatatan telah dilaksanakan.
4. Pemrosesan Informasi dan Komunikasi (*Information Processing and Communication*), pada komponen ini informasi diidentifikasi, diambil dan diubah sepanjang waktu dan menyediakan formulir untuk memperbolehkan karyawan mengubah tanggung jawabnya.
5. Pemantauan (Monitoring), pada komponen ini berfungsi untuk memastikan bahwa pengendalian internal telah berjalan dengan baik Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi yaitu: keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan berlaku.

2.6 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Propto, Susilo (2010)	Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap ketrandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada pemerintah kabupaten Sragen)	Pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, ketrandalan, ketepatanwaktuan pelaporan keuangan	Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah
2.	Saleba, Siti Nurjannah (2014)	Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan	Sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi SDM, Efektivitas pengelolaan keuangan daerah	terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan terdapat pengaruh yang

		keuangan daerah		signifikan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah
3	Karmita, Fitriah (2015)	Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi SDM terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi	Pemanfaatan teknologi informasi, Kompetensi SDM dan efektivitas sistem informasi akuntansi	Pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi
4	Sudarsono, Galig (2016)	Pengaruh sistem pengendalian intern , kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah kab.Grobogan	Sistem pengendalian intern , kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi	Sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Sistem

Informasi Akuntansi

Pemanfaatan teknologi informasi berarti memanfaatkan teknologi dalam pengolahan data untuk mempermudah kerja pegawai. Menurut Hamzah (2009)

pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Winidyaningrum & Rahmawati, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Karmita (2015) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Selanjutnya hasil penelitian Sudarsono (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi.

Berdasarkan hasil penelitian Karmita (2015) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi dan teori diatas penulis menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada suatu entitas. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis, yaitu:

H₁ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada SKPD di pemerintah daerah Kota Bandar Lampung.

2.7.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi

Kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005 dalam Nurillah, 2014). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga (Nurillah, 2014). Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian Karmita (2015) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi

informasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Selanjutnya hasil penelitian Sudarsono (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi.

Berdasarkan hasil penelitian Karmita (2015) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi dan teori diatas penulis menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada suatu entitas. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis, yaitu:

H₂ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada SKPD di pemerintah daerah Kota Bandar Lampung.

2.7.3 Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Hartadi dalam Kristanto (2009:45), sistem pengendalian internal yang kuat, yaitu melalui kebijakan akuntansi yang sehat, penyelenggaraan sistem perkiraan yang cukup lengkap dan efektif, adanya perlindungan aktiva perusahaan dan berfungsinya staff pemeriksaan internal. Sudarsono (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi.

Berdasarkan hasil penelitian Sudarsono (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi dan teori diatas. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis, yaitu:

H₃ : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah

2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

